

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai teori yang menjadi dasar pokok penelitian. Teori yang dibahas dalam bab ini meliputi definisi pengangguran, pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, pendidikan, dan hubungan antar variabel.

2.1. Ketenagakerjaan

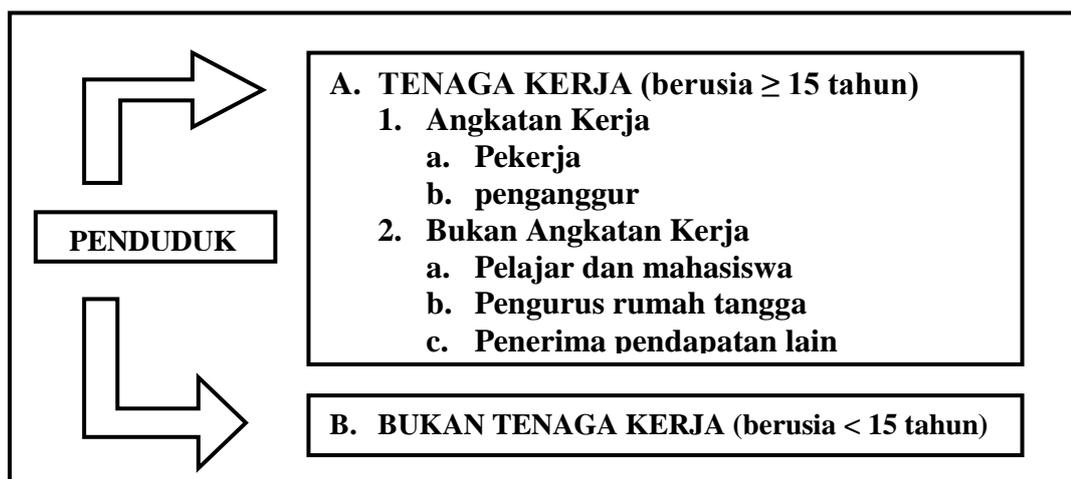
Dalam proses produksi sebagai suatu struktur dasar aktivitas perekonomian, tenaga kerja merupakan faktor yang sangat penting disamping sumber alam, modal dan teknologi. Menurut Sumarsono (2003) tenaga kerja sebagai pelaku ekonomi, berkemampuan bertindak aktif untuk mempengaruhi dan melakukan manajemen terhadap faktor produksi lainnya yang terlibat dalam proses produksi.

Untuk memetakan dan menganalisis ketenagakerjaan di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) menerapkan pendekatan angkatan kerja yang diperkenalkan oleh *International Labour Organization* (ILO). Dalam pendekatan ini secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua golongan yaitu tenaga kerja (*manpower*) dan bukan tenaga kerja. Yang tergolong sebagai tenaga kerja adalah penduduk yang termasuk dalam batas usia kerja. Batas usia kerja berbeda-beda antar negara satu dengan yang lain. Batas usia kerja yang dianut oleh Indonesia adalah minimum 15 tahun, tanpa batas umur maksimum.

Tenaga kerja (*manpower*) dipilah pula kedalam dua kelompok yaitu angkatan kerja (*labor force*) dan bukan angkatan kerja. Yang termasuk angkatan kerja adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja,

atau mempunyai pekerjaan namun untuk sementara sedang tidak bekerja, dan yang sedang mencari pekerjaan. Sedangkan yang bukan angkatan kerja adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan, yakni orang-orang yang kegiataannya bersekolah, mengurus rumah tangga serta menerima pendapatan tetapi bukan merupakan imbalan langsung atas jasa kerjanya (pensiunan).

Selanjutnya angkatan kerja dibedakan pula menjadi dua sub-kelompok yaitu pekerja dan penganggur. Pekerja adalah orang-orang yang mempunyai pekerjaan, mencakup orang yang mempunyai pekerjaan dan memang sedang bekerja, serta orang yang mempunyai pekerjaan namun untuk sementara waktu sedang tidak bekerja. Sedangkan pengangguran ialah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, lengkapnya orang yang tidak bekerja dan masih atau sedang mencari pekerjaan. Berikut merupakan gambar yang menunjukkan pemilahan penduduk berdasarkan pendekatan angkatan kerja:



Sumber: Amir (2007)

Gambar 2.1
Pemilahan Penduduk berdasarkan Pendekatan Angkatan Kerja

2.2. Masalah ketenagakerjaan

Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sering dijumpai di banyak negara, bahkan tidak hanya di negara-negara sedang berkembang, akan tetapi juga dialami oleh negara-negara yang sudah maju. Indonesia yang merupakan negara berkembang adalah satu dari banyak negara tersebut yang memiliki masalah mengenai tenaga kerja. Masalah yang dimaksud adalah masalah mengenai tingginya jumlah pengangguran, yang diketahui merupakan masalah yang dapat menghambat proses pembangunan.

Masalah pengangguran muncul sebagai imbas dari pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan pekerjaan yang relatif lambat (Arsyad, 2010:358). Selain itu menurut teori *human capital* pengangguran tidak hanya disebabkan karena kurangnya lowongan pekerjaan, namun dapat disebabkan oleh kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja atau persyaratan yang dibutuhkan oleh dunia kerja tidak dapat dipenuhi oleh pencari kerja (Todaro dan Smith, 2011:445).

2.2.1. Definisi Pengangguran

Definisi pengangguran menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan adalah penduduk yang tidak berkerja tetapi sedang mencari perkerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi mulai bekerja. Selain itu dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, yang dimaksudkan pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu

tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya (Sukirno, 2000:472).

Pengangguran menunjukkan sumber daya yang terbuang, karena para pengangguran memiliki potensi untuk memberikan kontribusi pada pendapatan nasional, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Untuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah bisa didapat dari membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja dan dinyatakan dalam persen. Hal ini dapat ditulis dalam rumus menjadi:

$$\text{Tingkat Pengangguran} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat yang akan menyebabkan penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Menurut Mankiw (2006), setiap hari sebagian pekerja kehilangan atau keluar dari pekerjaannya, dan sebagian lagi yang menganggur diterima bekerja. Berikut adalah transisi antara menjadi pekerja atau penganggur:



Sumber: Mankiw (2006)

Gambar 2.2
Transisi Antara Menjadi Pekerja Atau Penganggur

Transisi antara menjadi pekerja dan penganggur yang ditunjukkan pada Tabel 2.2 menjelaskan, bahwa dalam setiap periode bagian s dari orang-orang yang bekerja kehilangan pekerjaan mereka, dan bagian f dari para penganggur memperoleh pekerjaan. Pasang surut yang terjadi secara terus menerus ini menentukan bagian dari angkatan kerja yang menganggur. Jadi tidaklah mengejutkan jika pengangguran menjadi topik yang sering dibicarakan dalam perdebatan politik dan para politisi sering mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan kerja (Mankiw, 2006:154).

2.2.2. Tipe Pengangguran

Menurut sebab atau sumber terjadinya, McEachern (2000) menggolongkan pengangguran kepada empat tipe yaitu friksional, struktural, musiman dan siklikal.

1) Pengangguran Friksional (*frictional unemployment*)

Pemberi dan pencari kerja memerlukan waktu untuk berinteraksi dengan pasar tenaga kerja. Waktu yang diperlukan untuk mempertemukan permintaan tenaga kerja dengan penawaran tenaga kerja menghasilkan pengangguran friksional. Jadi, pengangguran friksional adalah jenis pengangguran yang muncul karena adanya waktu yang diperlukan untuk menyesuaikan antara kualifikasi pekerja dengan pekerjaan yang tersedia.

2) Pengangguran Struktural (*structural unemployment*)

Adanya lowongan dan pengangguran pada saat yang sama adalah bahwa penganggur tidak mempunyai keterampilan yang diminta pemberi

kerja, atau tidak tinggal di daerah yang keterampilannya dibutuhkan. Pengangguran yang muncul karena ketidaksesuaian keterampilan atau lokasi geografis disebut pengangguran structural.

3) Pengangguran Musiman (*seasonal unemployment*)

Pengangguran musiman adalah pengangguran yang disebabkan oleh perubahan musiman atas permintaan dan penawaran tenaga kerja dalam satu tahun. Orang yang bekerja pada pekerjaan musiman tahu bahwa mereka mungkin akan tidak dipekerjakan pada musim sepi.

4) Pengangguran Siklikal (*cyclical unemployment*)

Pengangguran siklikal adalah fluktuasi pengangguran yang disebabkan oleh siklus bisnis. Dengan menurunnya produksi pada masa resesi, banyak perusahaan mengurangi permintaan input, termasuk tenaga kerja. Pengangguran siklikal meningkat selama masa resesi dan menurun pada masa ekspansi.

Selanjutnya, berdasarkan cirinya pengangguran dibagi menjadi empat kelompok (Sukirno, 2000:10), yaitu:

1) Pengangguran Terbuka

Pengangguran ini adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal dan sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah daripada pertambahan tenaga kerja. Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari

kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan suatu industri.

2) Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran ini adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Salah satunya adalah karena kecilnya perusahaan dengan tenaga kerja yang terlalu banyak sehingga untuk menjalankan kegiatannya tidak efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi.

3) Setengah Menganggur

Pengangguran ini adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari dalam seminggu, atau satu hingga empat jam sehari. Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti ini digolongkan sebagai setengah menganggur.

4) Pengangguran Bermusim

Pengangguran ini adalah tenaga kerja yang tidak bekerja karena terikat pada musim tertentu. Pengangguran seperti ini terutama di sektor pertanian dan perikanan. Pada umumnya petani tidak begitu aktif di antara waktu sesudah menanam dan panen. Apabial dalam masa tersebut mereka tidak melakukan pekerjaan lain maka mereka terpaksa menganggur.

2.2.3. Dampak Pengangguran

Menurut Sukirno (2000) beberapa akibat buruk dari pengangguran dibedakan kepada dua aspek, yaitu :

a) Akibat buruk terhadap kegiatan perekonomian

Tingkat pengangguran yang relatif tinggi tidak memungkinkan masyarakat mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh. Hal ini dapat dengan jelas dilihat dari memperlihatkan berbagai akibat buruk yang bersifat ekonomi yang ditimbulkan oleh masalah pengangguran. Akibat-akibat buruk tersebut dapat dibedakan sebagai berikut :

- 1) Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak memaksimalkan tingkat kemakmuran yang mungkin dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional riil (nyata) yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya). Oleh karena itu, kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah.
- 2) Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang. Pengangguran diakibatkan oleh tingkat kegiatan ekonomi yang rendah, dan dalam kegiatan ekonomi yang rendah pendapatan pajak pemerintah semakin sedikit. Jika penerimaan pajak rendah, dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan berkurang sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menurun.

3) Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi.

Pengangguran menimbulkan dua akibat buruk kepada kegiatan sektor swasta. Yang pertama, pengangguran tenaga buruh diikuti pula oleh kelebihan kapasitas mesin-mesin perusahaan. Kedua, pengangguran yang diakibatkan keuntungan kelesuan berkurang. Kegiatan Keuntungan perusahaan yang rendah menyebabkan mengurangi keinginan untuk melakukan investasi.

b) Akibat buruk terhadap individu dan masyarakat

Pengangguran akan mempengaruhi kehidupan individu dan kestabilan sosial dalam masyarakat. Beberapa keburukan sosial yang diakibatkan oleh pengangguran adalah :

1) Pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencarian dan pendapatan.

2) Pengangguran dapat menyebabkan kehilangan keterampilan. Keterampilan dalam mengerjakan suatu pekerjaan hanya dapat dipertahankan apabila keterampilan tersebut digunakan dalam praktek.

3) Pengangguran dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Kegiatan ekonomi yang lesu dan pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan rasa tidak puas masyarakat kepada pemerintah.

2.3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator tolak ukur dalam menilai berkembang atau majunya sebuah negara. Simon Kuznets dalam Arsyad

(2010) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya yang disebabkan oleh adanya kemajuan teknologi, kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkannya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Arsyad (2010) pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh: (i) akumulasi modal seperti investasi baru yang berwujud tanah, peralatan fisik, dan sumber daya manusia, (ii) pertumbuhan penduduk, (iii) kemajuan teknologi, dan (iv) sumber daya institusi. Secara umum pertumbuhan ekonomi dilihat dari output yang mampu dihasilkan suatu negara dalam waktu tertentu. Kenaikan ataupun penurunan output diukur berdasarkan perubahan atas Produk Domestik Bruto (PDB). Jadi dalam pengertian makro, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan PDB yang berarti juga penambahan Pendapatan Nasional (Y). PDB digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dalam tingkat nasional sedangkan dalam tingkat regional menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

PDB terdiri dari beberapa komponen, yaitu konsumsi (C), investasi (I), pembelian pemerintah (G), dan ekspor neto (NX) (Mankiw, 2006:25). Komponen tersebut ditunjukkan dalam identitas pos pendapatan sebagai berikut:

$$Y = C + I + G + (NX)$$

Melalui persamaan di atas, diketahui bahwa rumah tangga mengkonsumsi sebagian output perekonomian, perusahaan dan rumah tangga menggunakan

sebagian output untuk investasi, dan pemerintah membeli sebagian output untuk kepentingan publik.

2.3.1. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran

Para ekonom meyakini bahwa faktor-faktor ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi merupakan faktor yang memiliki potensi yang dapat mempengaruhi terjadinya pengangguran. Arthur Okun (1929-1979) adalah salah satu pembuat kebijakan ekonomi di Amerika yang paling kreatif pada era sehabis perang. Pada tahun 1962, ia pernah menyusun hubungan empiris antara pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi (PDB).

Dari hasil hubungan empiris tersebut terindikasi bahwa terdapat hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran. Apabila perekonomian mengalami pertumbuhan, maka permintaan dan penyerapan tenaga kerja akan meningkat. Artinya bahwa bila laju pertumbuhan ekonomi tinggi maka jumlah pengangguran akan menurun. Begitupun sebaliknya, bila pertumbuhan ekonomi menurun maka semakin besarlah tingkat pengangguran. Relasi negatif antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran ini kemudian dikenal dengan hukum Okun (*Okun's Law*), sesuai nama Arthur Okun ekonom yang pertama kali mempelajarinya (Mankiw, 2006:249).

2.4. Upah

Upah merupakan wujud nyata dari sebuah bentuk pertukaran yang terjadi antara pengguna jasa dan pemberi jasa. Menurut Undang-Undang (UU) No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi

kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian pekerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan /atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Ahli ekonomi membuat perbedaan diantara dua pengertian upah, yakni upah nominal dan upah riil (Sukirno, 2000):

- a. Upah nominal adalah jumlah uang yang diterima para pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga mental atau fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi.
- b. Upah riil adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut membeli barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja.

2.4.1. Upah Minimum Provinsi

Upah minimum adalah kebijakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, yang diarahkan untuk mencapai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) selain memberi jaminan pekerja/buruh penerima upah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada dasarnya upah minimum pada setiap wilayah berbeda-beda. Upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi dinamakan Upah Minimum Propinsi (UMP). Upah minimum ini ditetapkan setiap satu tahun sekali oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah (sekarang Dewan Pengupahan Provinsi). Penetapan upah minimum propinsi

selambat-lambatnya 60 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum, yaitu tanggal 1 Januari.

Penetapan kebijakan upah minimum adalah sebagai jaring pengaman (*social safety net*) yang dimaksudkan agar upah tidak terus merosot sebagai akibat dari ketidakseimbangan pasar kerja (*disequilibrium labour market*). Selain itu penetapan kebijakan upah minimum juga bertujuan untuk menjaga agar tingkat upah pekerja pada level bawah tidak jatuh ke tingkat yang sangat rendah karena rendahnya posisi tawar tenaga kerja di pasar kerja. Agar pekerja pada level bawah tersebut masih dapat hidup wajar dan terpenuhi kebutuhan gizinya, maka dalam penetapan upah minimum mempertimbangkan standar kehidupan pekerja.

2.4.2. Hubungan Antara Upah Minimum dan Pengangguran

Keynes dalam *The General Theory* menyatakan alasan kedua adanya pengangguran adalah kekakuan upah (*wagerigidity*) atau gagalnya upah melakukan penyesuaian sampai penawaran tenaga kerja sama dengan permintaannya (Mankiw, 2006:369). Keynes menuliskan bahwa kenaikan dalam kesempatan kerja hanya bisa terjadi jika tingkat upah riil turun. Dengan kalimat lain, juga dapat dikatakan bahwa pengangguran hanya bisa berkurang jika tingkat upah turun.

2.5. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sarana dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan yang baik, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, kemampuan, dan keterampilan seseorang. Selanjutnya peningkatan jenjang pendidikan diharapkan seseorang agar

memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Oleh karena itu ketika seseorang memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya maka disebut keputusan investasi *human capital* (Todaro dan Smith, 2011:445).

Di masa sekarang, pendidikan diposisikan sebagai sarana untuk peningkatan kesejahteraan melalui pemanfaatan kesempatan kerja yang ada dan mencerminkan tingkat kepandaian atau pencapaian pendidikan formal dari penduduk karena semakin tingginya tamatan pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kemampuan kerja atau produktivitas seseorang dalam bekerja. Tujuan akhir program pendidikan adalah teraihnya lapangan kerja yang diharapkan. Pendidikan pada diri seseorang dapat meningkatkan kemampuan dalam memperoleh dan menggunakan informasi dan memperoleh pemahaman akan perekonomian serta memberikan pilihan apakah seseorang ingin menjadi konsumen, produsen atau menjadi warga negara biasa.

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditetapkan bahwa besarnya porsi anggaran pendidikan adalah 20 persen dari total APBN. Ini mengimplikasikan bahwa komitmen bangsa ini untuk menempatkan pendidikan sebagai salah satu komponen sumber daya pengetahuan, sehingga dipahami bahwa pengetahuan akan menjadi pembangkit kemajuan ekonomi. Secara tidak langsung pendidikan juga berpengaruh dalam pemenuhan kebutuhan pribadi seseorang dengan cara meningkatkan produktivitas sehingga akan mencapai standar hidup yang lebih baik. Angkatan kerja yang bekerja, modal fisik dan tanah dapat mengalami *diminishing return* sedangkan ilmu pengetahuan tidak bisa. Jadi investasi modal manusia merupakan faktor

utama dalam peningkatan produktifitas faktor produksi secara total (Kuncoro, 2004).

2.5.1. Hubungan Antara Pendidikan dan Pengangguran

Pendidikan dapat mempengaruhi kualitas modal manusia, oleh karena itu peningkatan jenjang pendidikan sering disebut sebagai investasi modal manusia (*Human Capital*). Jenjang pendidikan yang lebih tinggi diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup seseorang. Menurut Arsyad (2010), pendidikan (formal dan non-formal) memiliki peran penting untuk mengurangi pengangguran dalam jangka panjang, baik secara langsung melalui perbaikan produktivitas dan efisiensi secara umum, maupun secara tidak langsung melalui pelatihan dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas mereka dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan mereka. Menurut Santoso (2012) pendidikan yang lebih tinggi akan membuat seseorang lebih mampu untuk memecahkan masalah dalam proses produksi. Oleh karena itu masalah pengangguran dapat berkurang dengan peningkatan jenjang pendidikan yang tinggi.

2.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka telah dilakukan sebelumnya. Nugroho (2013) melakukan penelitian mengenai “Analisis PDRB, Inflasi, Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Angka Melek Huruf (AMH) Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1990 – 2011”. Analisis data menggunakan teknik *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMP dan AMH

berpengaruh positif dan signifikan terhadap TPT, sedangkan PDRB dan inflasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap TPT di Provinsi Jawa Tengah.

Muslim (2014) melakukan penelitian mengenai “Pengguguran Terbuka dan Determinannya di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta”. Analisis penelitian ini menggunakan data panel dengan tahun pengamatan 2007 – 2012 dan menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM). Variabel bebas yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan pengeluaran pemerintah, sedangkan variabel terikatnya yaitu tingkat pengangguran terbuka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten dan Kota Daerah Istimewa Yogyakarta.

Nurcholis (2014) melakukan penelitian mengenai “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 – 2014”. Analisis penelitian ini menggunakan data panel dengan menggunakan *Random Effect Model* (REM). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan IPM berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Timur. Variabel pertumbuhan ekonomi dan upah minimum berpengaruh negatif, sedangkan IPM berpengaruh positif.

Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti dan Karmini (2014) mengenai “Pengaruh Tingkat Inflasi, Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Bali”. Analisis data

menggunakan teknik *Ordinary Least Square* (OLS) dengan tahun pengamatan 2001 – 2013. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat inflasi dan upah minimum memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap TPT di Provinsi Bali, sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap TPT di Provinsi Bali.

Selanjutnya Cahyo (2016) melakukan penelitian mengenai “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Rata-rata Lama Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2009-2014”. Analisis penelitian ini menggunakan data panel dengan menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan rata-rata lama pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah pencari kerja yang mayoritas berusia 20-29 tahun yang setara dengan lulusan diploma dan sarjana serta jumlah unit usaha yang ada di Jawa Timur didominasi oleh industri kecil yang tidak mampu menyerap banyak tenaga kerja dengan latar belakang pendidikan cenderung rendah.